

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Maka dari itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Untuk meratakan pembangunan ini maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU Nomor 25 tahun 1999) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif), memberikan kewenangan bebas kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan seminimal mungkin campur tangan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif mempunyai hubungan Keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundangan-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif legislatif dan publik.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus di anggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008).

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah berhasil. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dana Bagi Hasil Bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Bersumber dari Alam. (Darise,2007:38).Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai segala kegiatannya, kali ini menimbulkan kesimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. Pemerintahan mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintahan ini adalah Dana

Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya tranfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah biasa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang menunjang kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila Pendapatan Asli Daerah berjumlah besar dan tingkat ketergantungan akan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah rendah maka ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi. Penyelenggaraan pemerintan oleh pemerintah pusat dan daerah yang otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro,2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktifitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal

tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Belanja daerah yang termasuk Belanja Modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Menurut Halim (2014:229) belanja modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Menurut Felix (2012) peningkatan belanja modal yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan belanja modal dalam kaitannya penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Fenomena yang ada, Kabupaten/Kota Karanganyar memiliki banyak proyek pembangunan seperti peningkatan kualitas jalan, pembuatan saluran air, renovasi pembangunan pasar tradisional, renovasi gedung sekolah, renovasi trotoar, renovasi rumah sakit umum daerah (RSUD), dan pembangunan lain-lain. Berbagai pembangunan tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam APBD

Kabupaten/Kota Karanganyar. (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, pemerintah Kabupaten/Kota Karanganyar selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Karanganyar dan diharapkan pendapatan tersebut mampu memberikan sumbangan terhadap pembelanjaan daerah Kabupaten/Kota Karanganyar, mengingat pemerintah Kabupaten/Kota Karanganyar tidak dapat secara terus menerus mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Lemahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukannya upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Menurut Juniawan,dkk(2018) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian Sasdi Yabsa (2014) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Rachim,dkk (2017) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian Edi Mianto,dkk (2013) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Edi Mianto,dkk (2013) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Galih Putranto (2014) menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Sudika,dkk (2017) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Galih Putranto (2014) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Pratiwi, dkk (2016) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris :

- a. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar.
- b. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar.
- c. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar.
- d. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Modal Kabupaten/Kota Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Karanganyar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi local yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

- b. Bagi STIE-AUB

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sector publik.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberi nilai positif sebagai masukan wawasan serta ilmu pengetahuan objek average diteliti, maupun dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I :PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisi uraian landasan teori yang mendasari penelitian dengan landasan teori yang dilengkapi penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan lokasi penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, keterbatasan dan saran yang diberikan.